

# Politik Identitas Etnis dan Representasi praktek kekuasaan simbolis dalam Harmonisasi Antar Etnis

Gesit Yudha<sup>1</sup>, Tin Amalia Fitri<sup>2</sup>, Isti Arini  
Universitas Islam Negeri Raden Intan

[gesit@radenintan.ac.id](mailto:gesit@radenintan.ac.id), [amalia.tin@gmail.com](mailto:amalia.tin@gmail.com), [istiarini@radenintan.ac.id](mailto:istiarini@radenintan.ac.id)

## Abstrack

*After the New Order in 1998, the enactment of regional autonomy required each region to carry out empowerment. This dimension has become a gap in local democratization to dominate local political power, whose main goal is to make efforts that focus on symbolic power as an effort to strengthen inter-ethnic harmonization, not vice versa to dominate power for certain ethnicities and even control economic resources in the area. . The approach used in this article is a qualitative method. The literature study is used primarily to trace the development of the politicization of identity in election politics with inter-ethnic harmonization. The reality on the ground that the results of local political democratization describe certain ethnic actors (groups) as rulers who have authority in the management of both interests and regional policies are still far from what is expected in the management of inter-ethnic harmonization which tends to override the term ethnic immigrants, this is what ultimately leads to conflict both conflicts of interest and inter-ethnic conflicts due to the gap. Therefore, the role of certain ethnic groups that win local political contestations has awareness in building inter-ethnic harmonization. Basically, the ethnicity of the dominant actor will show respect and build relations between ethnic groups to build togetherness, if the actor feels he has power over the practices carried out so that it is necessary to build joint communication and establish a joint strategy to build the region in realizing dynamic local politics and reflecting multiculturalism.*

**Keyword: Identity Politics, Local Wisdom, Ethnic Harmonization**

## Abstrak

Pasca orde baru pada tahun 1998 berlakunya otonomi daerah, mengharuskan tiap-tiap daerah untuk melakukan pemberdayaan. Dimensi itu menjadi celah dalam demokratisasi lokal untuk melakukan dominasi kekuasaan politik lokal, yang pada tujuan utamanya adalah melakukan upaya yang memusatkan pada kekuatan simbolis sebagai upaya dalam penguatan harmonisasi antar etnis bukan sebaliknya melakukan dominasi kekuasaan untuk etnis tertentu saja bahkan menguasai sumber daya ekonomi di daerah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Studi literatur digunakan terutama untuk menelusuri perkembangan politisasi identitas dalam politik pemilu dengan harmonisasi antar etnis. Kenyataan di lapangan hasil demokratisasi politik lokal menggambarkan para aktor (kelompok) etnis tertentu sebagai penguasa yang memiliki wewenang dalam pengelolaan baik kepentingan maupun kebijakan daerah masih jauh apa yang diharapkan dalam pengelolaan harmonisasi antar etnis cenderung mengesampingkan istilah etnis pendatang, inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik baik

konflik kepentingan maupun konflik antar etnis akibat kesenjangan itu. Maka dari itu, peran kelompok etnik tertentu yang memenangi konstestasi politik local memiliki kesadaran dalam membangun harmonisasi antar etnis. Pada dasarnya etnisitas aktor yang dominan akan menunjukkan respeknya dan terbangunnya relasi antar aktor etnis untuk membangun kebersamaan, apabila aktor merasa memiliki kuasa atas praktek yang dilakukan sehingga diperlukan membangun komunikasi bersama dan menjalin strategi bersama membangun daerah dalam mewujudkan politik local yang dinamis dan mencerminkan multikulturalisme.

***Keyword : Politik Identitas, Kearifan local, Harmonisasi etnik***

## **1. Pendahuluan**

Implikasi otonomi daerah tidak semuanya bersifat positif. Kendati demikian system sentralisasi sudah tidak ada, namun warisannya dalam bentuk intoleransi dan diskriminasi antara kelompok pendatang dan pribumi masih sangat mungkin menguat, hal ini membawa isu 'Putera Daerah'. Berikutnya menguatnya kantong-kantong kekuasaan otoriter di kelompok tertentu (*local strongmen*). Maka dengan demikian seharusnya peran kelompok etnik yang memenangi dalam kontestasi pemilu memiliki kesadaran dalam membangun kebersamaan dan terwujudnya komunikasi bersama dan menjalankan pembangunan asas dasar kearifan local yang ada untuk mewujudkan politik local yang dinamis harmonisasi antar etnis.

Multikulturalisme dalam sebuah percakapan yang menghadapkan identitas sebagai sebuah kekhususan budaya dan kebutuhan untuk menghadirkan integrasi social yang memungkinkan kelompok etnis dan budaya yang beragam itu dapat membangun sebuah kehidupan bersama yang lebih masuk akal. Praktek ini merupakan artikulasi dari kekuatan identitas etnis dan relasi antaretnik yang dilakukan aktor ketika memahami obyektifitas etnisitas melalui yang tercermin dari kondisi dan kedudukan kelompok identitas etnik. Oleh karena itu, umumnya aktor yang terlibat adalah mereka yang memahami dinamika sejarah dan kebudayaan etnisitasnya.

Pengakuan otoritas aktor menyebabkan aktor memiliki modal simbolik dan budaya yang tidak diragukan lagi. Adapun simbolik yang dimiliki aktor, seperti keturunan bangsawan (golongan atas dari pelapisan social tradisional), ketua paguyuban etnik, ketua organisasi masyarakat, dan dosen/guru. Sementara itu, modal budaya yang dimiliki aktor seperti gelar pendidikan tinggi, memiliki komitmen terhadap pendidikan, dan pengetahuan yang luas terhadap sejarah dan

kebudayaan etniknya. Maka perbedaan basis identitas actor ketika mendefinisikan eksistensi etnisitas tersebut menyebabkan terbangunnya relasi antaraktor (juga disebut relasi antaretnik) dalam bentuk penyatuan (afiliasi) dan pemisahan (deafiliasi) yang tidak jarang melibatkan massa berbasis etnisitas ke dalam praktek ini. Disinilah tampak bagaimana actor mereproduksi identitas etnik untuk kepentingan masa (kolektif) di satu sisi dan kepentingan diri actor pada sisi lain. Dari sisi kepentingan massa kolektif, actor akan mencerminkan representasi kelompok kolektif yang bertujuan untuk memperlihatkan dan memberi bentuk pada realitas penyatuan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Studi literatur digunakan terutama untuk menelusuri perkembangan politisasi identitas dalam politik pemilu dengan harmonisasi antar etnis. Dalam upaya memberikan gambaran mengenai fenomena yang dapat muncul dari politisasi identitas dan penguatan dalam harmonisasi antar etnis, studi ini merujuk pada literatur-literatur politik identitas yang kemudian dijadikan perspektif untuk memahami gejala-gejala serupa.

## **2. Perspektif Teori**

### **Konsep Dasar Identitas sebagai Sebuah Konstruksi Sosial**

Sejatinya dasar mengenai politik identitas yakni keberadaan sikap politik yang tefokus sub kelompok tertentu dan aktivitas berdasarkan klasifikasi kategori ras, gender, etnisitas, orientasi budaya, dan identifikasi politik lainnya. Isunya pada orientasi politik kelompok sub-nasional melihat perbedaan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Di luar itu, politik identitas juga dapat mengacu pada identitas kebangsaan atau identitas diri (self-identity) yang melintasi batas-batas etnik atau nasionalisme, misalnya isu wanita dan imigran.<sup>1</sup>

Politik identitas adalah ciri yang tidak dapat dihindari dari demokrasi liberal, sebab sistem politik itulah yang memberikan ruang bagi tumbuhnya upaya-upaya kelompok dalam mengartikulasikan kepentingan dan tujuannya. Namun identitas dalam demokrasi memuat masalah lain, karena identitas kelompok lebih bersifat memberi batasan ketimbang membebaskan individu.<sup>2</sup>

Selain itu, dalam demokrasi deliberatif yang mengutamakan dialog, klaim politik identitas tidak selalu mendukung nilai-nilai kebebasan dan keadilan, tetapi juga klaim yang dapat

---

<sup>1</sup> Wiarda, H. J. *Political Culture, Political Science, and Identity Politics: An Uneasy Alliance*. Ashgate. 2014 h.57

<sup>2</sup> Gutmann, A.. *Identity in Democracy*. Oxfordshire: Princeton University Press. 2003 h. 1

mengancam atau merusak nilai-nilai tersebut.<sup>3</sup> Permasalahan lainnya dari perjuangan politik identitas ialah siapa yang memberikan hak kepada kelompok yang mengatasnamakan identitas, misalnya agama atau etnis? Sementara etnis dan agama adalah konsep yang dibangun secara sosial. Artinya, konsepsi dan batasan identitas dapat ditafsirkan secara beragam, sehingga menimbulkan ambiguitas terkait kepentingan dan tujuan siapakah yang diemban dalam perjuangan politik identitas?.<sup>4</sup>

Menurut Iris Young<sup>5</sup>, kelompok sosial di dalam masyarakat tidak hanya diikat oleh atribut-atribut yang bersifat eksternal yang melekat pada diri mereka namun juga diikat oleh apa yang disebut dengan *a sense of identity*. Sekalipun seseorang tidak memiliki ciri-ciri kondisi objektif (warna kulit, jenis kelamin, umur, ras, etnis, kelas, wilayah, dan sebagainya) yang sama dengan sebagian besar orang dalam kelompok tersebut, dengan adanya rasa kesamaan identitas, dia tetap dapat diakui dan mengakui dirinya sebagai bagian dari identitas kelompok itu. Rasa kesamaan identitas tersebut dapat tumbuh dalam diri individu maupun kelompok dikarenakan terdapat keterkaitan latar belakang historis dan kultural di antara keduanya sehingga hal tersebut mampu mengikat individu melampaui hal-hal atributif yang menjadi ciri dari identitas. Oleh karena itu, identitas (baik kelompok maupun individu) di sini diartikan sebagai bentuk-bentuk khas narasi-narasi budaya yang menciptakan adanya persamaan dan perbedaan di antara diri kita dengan orang lain yang dengan stabil menafsirkan posisi sosial mereka<sup>6</sup>. Sementara politik identitas dengan demikian berarti pemanfaatan identitas individu maupun kelompok untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Kerkaitan dengan konsep-konsep identitas, Isin dan Wood membedakan konsep identitas menjadi dua kelompok utama. Pertama kelompok essentialist, yang melihat identitas sebagai manifestasi dari perbedaan yang sangat jelas atau dalam istilah Young disebut sebagai kondisi objektif seseorang yang berkaitan dengan gender, ras, kelas, etnisitas, atau orientasi sosial. Kedua, kelompok yang mengembangkan pandangan konstruktif yang tidak melihat identitas sebagai

---

<sup>3</sup> Eisenberg, A., & Kymlicka, W. Bringing Institutions Back In: *How Public Institutions Assess Identity*. In A. Eisenberg & W. Kymlicka (Eds.), *Identity Politics in the Public Realm: Bringing Institutions Back In*. Vancouver: UBC Press. 2011. h.2

<sup>4</sup> Ingram, D. Rights, Democracy, and Fulfillment in the Era of Identity Politics: *Principle Compromises in a Compromised World*. Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, Inc. 2004. h. 55

<sup>5</sup> Young, I. M. *Justice and the Politics of Difference*. Pricetown: Pricetown University Press. 1990. h. 1

<sup>6</sup> Davis, N. Y. *Gender and Nation, serial Politics and Culture*. London: Sage Publication. 2000. h. 23

sesuatu yang tetap dan tidak berubah<sup>7</sup>. Pandangan kedua tentang identitas ini lebih mengedepankan pada pemahaman bahwa upaya pembentukan identitas seseorang akan selalu bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Identitas tidak bersifat tetap dan tidak pernah stabil melainkan identitas dapat berubah sewaktu-waktu bahkan adakala identitas yang pada suatu saat dimaknai sebagai pembeda dirinya dengan kelompok lain, di lain kesempatan identitas tersebut dapat menjadi hal yang menandakan persamaan dirinya dengan kelompok lain. Paham kedua tentang identitas ini memercayai bahwa identitas selalu bersifat relasional, tidak pernah selesai, dan sedang dalam proses pembentukan. Isin dan Wood menjelaskan bahwa konsepsi identitas yang non-esensial di atas berpotensi untuk membuka celah guna memahami lebih baik mengapa kelompok mempunyai perasaan yang sangat kuat akan identitas mereka dan mengapa mereka menggunakan identitas mereka dalam perjuangan mendapatkan pengakuan. Calhoun Craigh dalam bukunya *Social Theory and the Politics of Identity* yang dikutip oleh Isin dan Wood menyatakan bahwa terdapat kemungkinan negatif dari politik identitas.

Apabila identifikasi identitas selalu dimaknai sebagai esensialisme, maka konstruksi sosial yang demikian dapat menjadi eksklusionarisme yang merupakan akibat dari konstruksi identitas kelompok yang sangat dramatis. Selanjutnya berkaitan dengan primordialisme, menurut Geertz<sup>8</sup> pola-pola berbeda terkait sentimen primordial terdiri dari lima pola. Pertama, satu kelompok dominan dan berjumlah sedikit, seperti Siprus dengan Yunani dan Turki. Kedua, satu kelompok sentral berdasarkan kedaerahan, seperti Jawa lawan kelompok luar Jawa. Ketiga, dua kelompok yang hampir seimbang kedudukannya, seperti kelompok Melayu dan Cina di Malaya. Keempat, pola gradasi berupa kelompok besar, kelompok medium, dan kelompok kecil dalam suatu negara, seperti di Filipina dan Nigeria. Kelima, terjadi fragmentasi etnis yang menyebabkan terbentuknya berbagai kelompok kecil, seperti di kebanyakan negara Afrika. negara dan cerminan negara demokrasi. Pentingnya pengelolaan isu primordialisme di negara-negara plural sesungguhnya tidak lain ditujukan untuk tercapainya integrasi nasional. Myron Weiner<sup>9</sup> dalam Finkle menyetujui sebuah kualifikasi sifat yang selanjutnya digunakan ketika membicarakan salah satu bentuk dari masalah integrasi. Ia menyetujui beberapa bentuk integrasi yaitu, pertama,

---

<sup>7</sup> Isin, E. E., & Wood, P. K. *Citizenship and Identity*. London: Sage Publication. 1999. H.12

<sup>8</sup> Geertz, C. *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States*. In C. Geertz, *Old Societies and New States* (pp. 105-157). New York: The Free Press. 1965.

<sup>9</sup> Weiner, M. *Integrasi Politik dan Pembangunan Politik*. In Y. Muhaimin, & C. MacAndrews, *Masalah-masalah Pembangunan Politik* (pp. 40-49). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1977.

Integrasi Nasional. Istilah integrasi ini berkaitan dengan pluralitas di dalam suatu nation-state yang sebetulnya bangunan nation-state ini terdiri dari berbagai macam bangsa yang memiliki budaya, bahasa, nilai, dan sistem politiknya masing-masing.

Keragaman di dalam *nation-state* ini sesungguhnya dicirikan dengan dengan tingginya loyalitas budaya yang dijunjung tinggi oleh masing-masing budaya yang mana pada masa sebelum menjadi nation-state, loyalitas ini terbelenggu oleh kekuatan kolonial untuk kepentingan kolonial. Oleh karena itu, Weiner mengemukakan setidaknya ada dua strategi yang dapat dilakukan untuk membangun integrasi nasional di tengah tingginya loyalitas budaya, (1) melakukan eliminasi atas ciri-ciri budaya khas masyarakat minoritas menjadi budaya nasional, biasanya mengintegrasikannya menjadi budaya yang dominan. Cara ini sering disebut dengan kebijakan asimilasi, atau (2) membangun loyalitas nasional tanpa perlu melakukan eliminasi terhadap budaya subordinate, atau yang lebih dikenal dengan kebijakan *unity in diversity*. Bentuk kedua adalah Integrasi Teritorial. Integrasi ini berkaitan dengan terdapatnya satu kewenangan sentral yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok dalam satu teritorial tersebut. Ketiga, Integrasi Nilai yang dalam pengertian sederhana diartikan sebagai terdapatnya prosedur yang mudah diterima untuk melakukan resolusi konflik. Keempat, Integrasi Elit dan Masa. Integrasi ini berhubungan dengan bagaimana menyatukan elit dan masa yang mana diketahui bahwa elit dan masa memiliki tujuan dan nilai yang berbeda. Kelima, Perilaku Integratif yang berkaitan dengan kapasitas dan kesiapan individu untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan tertentu untuk sebuah pencapaian dalam sebuah masyarakat modern. Perilaku integrated yang dimiliki individu tersebut menjadi faktor yang penting dalam mendukung pembangunan suatu bangsa<sup>10</sup>.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **4.1 Politik Identitas : Dari Perspektif hingga Pelaku**

Politik identitas mendapat tempat yang istimewa dalam beberapa tahun terakhir. Dalam studi pasca kolonial mengenai politik identitas sudah lama digeluti. Pemikir seperti Ania Loomba, Homi K. Bhabha dan Gayatri C Stivak adalah nama-nama yang biasa dirujuk. Mereka di rujuk karena sumbangsinya dalam meletakkan politik identitas sebagai ciptaan wacana sejarah dan

---

<sup>10</sup> Ibid. h. 48-49

budaya. Sementara dalam literatur ilmu politik, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (*Political Identity*) dengan politik identitas (*political of identity*).<sup>11</sup>

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian memuka dalam praktek politik sehari-hari. Karena itu para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Misalnya saja Castells<sup>12</sup> politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikotural dari seorang individu yang memberi arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.

Dalam diskursus teoritis politik identitas, terdapat perdebatan dua kubu besar ketika mendefinisikan identitas, yakni kubu yang berpaham komunitarianisme dengan liberalism (Habermas dan Hardiman 2009).<sup>13</sup>

Bagi penganut liberalism, individu adalah makhluk bebas yang tidak terkait konteks kultural konkretnya (*unencumbered self*). Atas dasar tersebut, penganut liberalise berpandangan bila kita mengabstraksi individu itu dengan menyingkirkan ciri-ciri konkretnya yang berasal dari komunitasnya, kita akan mendapatkan sebuah gambaran abstrak universal tentang “manusia pada umumnya” yang bersih dari ciri-ciri dan nilai-nilai yang berasal dari komunitas, tradisi, dan identitas kolektifnya.

Individu atau subyek yang tidak bersituasi ini hanya memiliki ciri universal yang sama, yaitu kemampuannya memilih tujuan-tujuan menurut preferensi-preferensi individualnya.<sup>14</sup> Selanjutnya, dengan memakai konsep subyek etis dan subyek hukum, penganut liberalisme beranggapan bahwa subyek etis mengacu pada suatu identitas yang ditentukan orientasi kultural

---

<sup>11</sup> *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek didalam ikatan suatu komunitas, politik sedangkan *political identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (basik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik.

<sup>12</sup> Manuel Castells, *Network Society From Knowledge to Policy*. Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations, 2010:6-7

<sup>13</sup> Michael Sandel adalah tokoh atau ilmuwan yang mewakili kubu komunitarianisme. Berbeda dengan neo marxis, kubu ini lebih memilih mengolah isi kritik pada ranah teori politik, dalam pijakannya teoritisnya, para peneliti komunitarian lebih menghubungkan diri pada Aristoteles, Hegel, Rousseau, A. Tocqueville di =bandingkan KarlMarx. Sementara itu, tokoh yang mewakili penganut, tokoh inspirasi kaum liberalism adalah I. Kant. T. Hobbes. J. S. Mill dan Montesque.

<sup>14</sup> F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 182.

dan arah-arah keyakinan religious. Jadi, subyek tidak bersangkutan dengan identitas *private* seseorang yang dapat berubah melalui perubahan orientasi hidup, melainkan bersangkutan dengan identitas publik.

#### **4.2 Konstruksi Teori Politik Identitas dan Multikulturalisme sebagai Alternatif**

Sejatinya *Politics Identity* menggambarkan suatu proses dialog untuk memahami identitas sendiri, dalam suatu kenyataan social, politik identitas merupakan suatu keniscayaan. Untuk memahami politik identitas memerlukan bingkai pemahaman dialog menginternalisasi dan eksternalisasi (eksterior) dan eksternalisasi-internalitas (interior)<sup>15</sup>.

Dalam memahami politik identitas dalam pemahaman ekterior merupakan realitas dari struktur obyektif yang ada dilapisan masyarakat. Keberadaan masyarakat yang beranekaragam kultur dari berbagai background identitas yang berbeda, dari etnik, ras, agama maupun jenis kelamin merupakan suatu keadaan lapisan social yang tak bisa dikesampingkan keadaanya.

Adanya perbedaan alami ini mendorong setiap individu untuk membangun reaksi sosial di antara idividu masing-masing dalam arena kehidupan (baik sosial, ekonomi, maupun politik). Adapun relasi yang dibangun tersebut bisa saja melekat (*embedded*) dengan identitas alami yang dimiliki (agama, etnik, gender), tapi dapat juga terlepas dari konteks identitas yang ada sebelumnya. Bahkan, dari relasi yang dibangun tersebut, tida menutup kemungkinan lahirnya “identitas baru” dengan ciri dan karateristik yang sama sekali berbeda dengan identitas-identitas yang ada sebelumnya.

Sementara itu, pemahaman interior, yang menekankan politik identitas, merupakan bagian dari diri pelaku sosial. Tindakan sosial atau politik yang dilakukan aktor senantiasa mewakili atau dipengaruhi kepentingan-kepentingan identitas asal aktor tersebut. Berangkat dari uraian dan pemahaman eksterior dan interior tersebut, maka pembentukan identitas (etik, agama, dan sebagainya) senantiasa bertitik tolak pada habitus yang memiliki aktor.

Dalam Purwanto<sup>16</sup>, multikulturalisme didefinisikan oleh banyak kalangan sebagai sebagai sebuah

---

<sup>15</sup> Berger dan Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990)

<sup>16</sup> . Purwanto. *Politik Identitas Dan Resolusi Konflik Transformatif*. Jurnal Review Politik Volume 6 Nomor 01 Juni Tahun 2015. H. 76



kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain adalah sebuah tema yang relatif baru dibicarakan di negeri ini. Sebagai sebuah tema, multikulturalisme dibicarakan umumnya dalam kerangka mengunjungi kembali (*revisiting*) dan menemukan kembali (*reinventing*) gagasan-gagasan yang lebih masuk akal tentang bagaimana sebuah masyarakat majemuk di Indonesia ini dapat dikembangkan dalam sebuah konsepsi masyarakat “warna-warni” yang tidak saja berciri partisipatoris namun juga emansipatoris.

Konsepsi dasarnya yakni menggali suatu jawaban mengenai tentang kelompok etnik dan budaya yang seharusnya menempatkan dirinya pada posisi kehidupan universal dalam sebuah identitas masyarakat dan memuat nilai demokrasi, keadilan, persamaan dan kebebasan. Ihwal, mengenai suatu pertanyaan besar mengenai kelompok etnik dan budaya yang berbeda denominasinya itu disatu pihak memiliki kesanggupan untuk memelihara identitas kelompoknya dan di pihak lain mampu berinteraksi dalam ruang bersama yang ditandai oleh kesediaan untuk menerima pluralisme dan toleransi (mengakui dan menghormati perbedaan).

Pada awalnya merupakan bukan perkara sederhana, dalam ketidaksederhanaan perkara yang pertama kesadaran bersama di wujudkan dalam suatu ruang yang memberikan kebebasan, kebersamaan untuk melakukan suatu pemahaman yang seragam dan mengundang berbagai lapisan berbeda dalam menemukan kebutuhan bersama dan mewujudkan suatu penyatuan ketingkat yang lebih tinggi.

Dalam proses yang kedua tidak terjadi dalam keadaan ruang terisolasi dari berbagai persoalan ketidakmerataan, ketidakadilan mengenai cara sumber-sumber politik dan ekonomi itu dialokasikan dan didistribusikan dalam masyarakat nasional dan internasional. *Ketiga*, perubahan yang berlangsung di tataran global mendiktekan agenda-agenda politik dan ekonomi baru yang mempersempit kesempatan untuk mendefinisikan kembali gagasan-gagasan dasar tentang negara (serba-) bangsa (*the idea of Indonesian (multi-) nation-state*) tanpa mengindahkan gagasan-gagasan dan praktek-praktek materialiserasional yang dibawa serta oleh ekonomi pasar global.

Kaitannya dengan konstruksi multikulturalisme memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan mengeliminasi ketegangan dikotomis tentang realitas ganda atau ragam di sekitar etnisitas dan budaya. Jelas, multikulturalisme tidak pernah dimaksudkan untuk menghilangkan kekhususan (*specificity*) dari sebuah ciri etnik atau budaya; tidak juga dimaksudkan untuk meleburnya ke dalam sebuah keumuman (*generality*). Dengan definisi seperti ini, multikulturalisme dalam pandangan Purwanto<sup>17</sup> adalah, sebuah formasi sosial yang membukakan jalan bagi dibangunnya ruang-ruang bagi identitas yang beragam dan sekaligus jembatan yang menghubungkan ruang-ruang itu untuk sebuah integrasi.

Menata Politik Etnisitas Kebangkitan politik etnisitas di ranah lokal sebagaimana dijelaskan diatas, tentu saja butuh pencermatan yang lebih serius. Karena kalau tidak, akan terjadi gesekan dan pertentangan yang maha dahsyat untuk Indonesia ke depan. Karena itu Indonesia yang plural dari sisi etnisitas menimbulkan pertanyaan dapatkan masyarakat yang multi-etnik ada tanpakonflik yang berarti dikalangan kelompok-kelompok etnis yang berbeda? Jawaban atas pertanyaan di atas adalah demokrasi konsosiasional. Karena demokrasi konsosiasional menyarankan agar semua aktor yang ada di dalam masyarakat melakukan kerjasama antara etnisitas. Demokrasi konsosiasional mengharapkan berbagai kelompok etnis itu salingmerembes secara teritorial dan genetika. Sedangkan dari sudut pandang politik Demokrasi konsosiasional<sup>18</sup> berusaha menciptakan suasanaharmonis antar etnis dengan menerapkan dua nilai penting, yakni. Pertama,tidak terdapat susunan kelompok hirarkis sehingga tidak ada kelompok yang dominan atau yang mengeksploitir yang lainnya. Kedua, terdapat pembagian kekuasaan politik yang sama dan semua kelompok etnis terwakili secara proporsional di dalam struktur kekuasaan. Dua nilai yang ditawarkan dalam demokrasi konsosiasional tentu saja membutuhkan prasyarat dan aturan main yang harus ditaati oleh semua komunitas yang begitu plural pembilahan SARA-nya di beberapa lokal. Ada empat prasyarat menurut Lijphart<sup>19</sup> dalam mempraktekkan demokrasi konsosiasional di ranah lokal. Pertama, kemampuan dan kemauan untuk mengakui bahaya-bahaya instabilitas yang merupakan inheren dalam masyarakat yang tingkat fragmentasi dan polarisasi sosialnya tinggi. Kedua, memerlukan adanya komitmen untuk memelihara nation-state yang ada.

---

<sup>17</sup> Ibid, h.77

<sup>18</sup> Lijphart, Arend, and Waisman, Carlos H. (eds.). *Institutional Design in New Democracies*. Boulder: Westview, 1996. H. 258-268

<sup>19</sup> Lijphart, Arend (1971). "Comparative politics and the comparative method". *American Political Science Review*. 65 (3): 682–693. doi:10.2307/1955513. JSTOR 1955513

Artinya para tokoh masyarakat harus mempunyai keinginan untuk mencegah adanya kemungkinan disintegrasi daerah. Ketiga ada kemampuan untuk mengangkat persoalan antar sub kultur masing-masing cleavages ke tingkat yang lebih tinggi. Keempat ada kemampuan untuk menempa usaha mencari penyelesaian yang tepat guna memenuhi tuntutan dari masing-masing sub kultur, dengan ditemukannya aturanmain yang jelas serta pada tingkat kelembagaan yang tepat. Aturan main merupakan hal yang sangat esensial dalam demokrasi konsosiasional. Adapun aturan mainnya mencakup: *Politics is not a game, it is a business*. Artinya proses politik hendaknya ditujukan untuk mencapaihasil, bukan untuk melihat siapa yang kalah dan yang menang; *Agree to disagree*. Artinya setiap sub kultur harus mengakui ada perbedaan yang tajam dalam hal-hal tertentu, misalnya ideologi, sehingga tidak perlu ada pemaksaan dari satu ideologi atas ideologi yang lain; *Summit meeting*. Yang dimaksudkan disini adalah diplomasi pada tingkat puncak. Memang akan ada peranan yang besar dari para pemimpin, akan tetapi hal ini ditujukan untuk meredam konflik sehingga tidak meluas. Peranan mereka adalah menemukan persamaan supaya tercapai konpromi; *Proportionality*. Artinya sub-kultur akan memperoleh porsi kekuasaan dan konsekuensi-konsekuensinya sesuai dengan proporsi kekuatan yang dimiliki; *Depolitization*. Artinya, bahwa dalam memberikan argumen hendaknya argumen tersebut tidak selalu diwarnai oleh sentimen politik agar emosi massa dapat diredam; *Secrecy*. Maksudnya adalah bahwa para tokoh harus mampu membatasi dan menjaga kerahasiaan dari apa yang telah diputuskan tidak perlu dibawa ke masyarakat, dengan demikian sentimen politik dapat dikurangi dan negosiasi mudah untuk dilaksanakan. Model demokrasi konsosiasional ala Arend Lijhart<sup>20</sup> cocok untuk pengelolaan politik identitas Indonesia ke depan. Tawaran ini membuka kebekuan dan sekat-sekat politik primordial sedang marak di ranah lokal. Pengadopsian demokrasi konsosiasional akan mengikis pandangan oposisi biner yang selama ini dijalankan oleh para elit untuk menggapai kekuasaan bisa diminimalisir. Politik identitas yang dibangun di atas pondasi politik perbedaan tidak lagi sebagai sesuatu yang terpisah atau dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri. Homi K Bhabha<sup>21</sup> menganjurkan terjadi ruang negosiasi identitas cultural yang mencakup perjumpaan dan pertukaran budaya untuk menghasilkan pengakuan timbal-balik. Tawaran Bhabha menarik, hanya saja belum terbukti. Sementara tawaran Arend Lijhart dengan demokrasi konsosiasional terlepas dari cacat bawaannya sudah teruji dalam penataan politik identitas khususnya di Eropa Barat,

---

<sup>20</sup> Ibid h.694

<sup>21</sup> Bhabha, Homi K. *The Location of Culture*. London: Routledge, 1994.

misalnya di Negara Kanada, Belgia dan Swis. Bahkan Vanden Berghe mengemukakan bahwa Swis adalah contoh terbaik bagi keharmonisan etnisitas. Selanjutnya dengan nada berkellar Van den Berghe mengatakan “jika negara ini tidak ada, maka negara ini perlu ditemukan”. Ia berkata demikian karena kemampuan Swis dalam menata negaranya yang multi etnis.

#### **4.3 Praktik Dominasi Kekuasaan Simbolis dan Harmonisasi Etnik**

Semangat otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak Januari 2001 adalah pengalihan kewenangan pusat kepada daerah untuk mengelola kegiatannya secara otonom. Pengalihan kekuasaan ini diharapkan dapat mendorong proses kebijakan publik menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel serta membuat pemerintah daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika lokal<sup>22</sup>. Hal yang sama tentunya berlaku juga bagi pemerintah pusat, apalagi pascapemilu presiden 2014. Ancaman utama pemerintahan baru tentunya adalah stabilitas. Untuk itu, pencegahan konflik adalah isu strategis yang harus dijadikan perhatian. Apalagi, konflik yang terjadi di Indonesia umumnya bermula dari skala lokal.

Dalam kenyataannya praktik ini merupakan dari kekuatan identitas etnik dan relasi antaretnik yang dilakukan seorang actor tatkala memahami obyektivikasi etnisitas melalui hal yang tercermin dari kondisi dan kedudukan kelompok etnis. Pada dasarnya actor yang terlibat yakni yang memahami dinamika historis dan kebudayaan etnisitasnya, seperti tokoh kelompok etnis dan kampus. Dengan kata lain praktik ini menjelaskan aspek bahwa setiap actor harus memahami dinamika sejarah dan kebudayaan etnisitasnya sebelum memasuki ranah ini. Dalam hal ini actor politik, pengusaha dan massa tidak banyak terlibat dalam hal ini.

Maka yang seharusnya terjadi dalam politik local mengenai identitas etnik juga berkaitan dengan tujuan untuk memunculkan toleransi dan menjaga harmonisasi etnik seperti yang dikatakan Agnes Heller<sup>23</sup> memiliki pandangan yang lebih spesifik mengenai politik identitas itu sendiri. Heller menilai bahwa politik identitas adalah strategi politik yang memfokuskan pada perbedaan sebagai kategori utamanya. Menurutnya politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan,

---

<sup>22</sup> Dwiyanto, A, dkk.. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. 2002. H 7-8

<sup>23</sup> Ubed. .. *Politik Identitas Etnis*. Magelang: Indonesia Tera. 2002

namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan, dan pertentangan etnis.

Kemala Chandrakirana<sup>24</sup> dalam artikelnya “Geertz dan Masalah Kesukuan” menuturkan bahwa politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya. Pendapat tersebut juga sekaligus mengelaborasi kemungkinan kedua yang dikemukakan oleh Heller perihal pola intoleransi maupun pertentangan etnis.

Maka dalam hal ini unsur-unsur kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memahami dinamika lokal sehingga partisipasi public daerah pun semakin besar. Hal ini karena umumnya masyarakat daerah masih memegang teguh adat dan budaya lokal. Jika pemerintah daerah mengerti kearifan lokal yang ada di wilayahnya, dengan sendirinya partisipasi masyarakat akan meningkat. Masyarakat akan merasa diperhatikan dan dimengerti oleh pemimpinnya. Disini, semangat otonomi daerah berperan ketika masyarakat daerah benar-benar berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik di daerahnya sendiri. Semakin terlibatnya publik dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, berarti terwujudnya harmonisasi etnik.

Karenanya integrasi antara otonomi daerah dengan kearifan local memiliki korelasi sangat penting terbangunnya memberdayakan masyarakat, khususnya bidang perekonomian masyarakat. Dalam praktik dominasi kekuasaan simbolis, seseorang yang memiliki wewenang juga dapat mendistribusikan dalam kebersamaan ekonomi itu sendiri, jika perekonomian berjalan baik maka akan sejahtera dan terjalinlah komunikasi baik antar etnik di suatu daerah tersebut. Karena aspek kebersamaan dalam perekonomian dilakukan dan muncullah harmonisasi etnik. Akan tetapi, apabila hal itu diabaikan dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat.

Walaupun seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki pemimpin, masih saja ada daerah yang miskin atau tidak diperhatikan. Karena itulah, otonomi daerah memerlukan kearifan lokal. Harus ada transformasi paradigma kemajemukan dan multikulturalisme dengan kearifan lokal masing-

---

<sup>24</sup> Chandakirana, K.. Geertz. *Politik dan Masalah Kesukuan*. Jakarta. Prisma No. 2/1969.1989

masing ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Semangat otonomi daerah bukanlah egosentrisme, tetapi bagaimana daerah mampu mandiri dalam mengatur masalah rumah tangganya sendiri sehingga mampu meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal harus jadi bagian dari budaya bangsa yang dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan. Kehadiran budaya merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari *local wisdom*. pentingnya teori damai dari Galtung<sup>25</sup> yang menyatakan bahwa kondisi tanpa kekerasan bukan hanya bersifat personal atau langsung, melainkan juga bersifat struktural atau tidak langsung. Galtung juga menekankan bahwa kondisi damai adalah kondisi tanpa kekerasan dan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.

Jika kondisi ini dapat terwujud, niscaya konflik tidak akan terjadi. Ketika masyarakat daerah memiliki partisipasi yang tinggi, kegiatan ekonomi juga terkena dampaknya. Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan pembangunan daerah berbasis pemberdayaan ekonomi, yang antara lain meliputi pengembangan kemitraan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi rakyat<sup>26</sup>.

San Afri Awangi, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, menjelaskan mengenai substansi ekonomi kerakyatan yang mensyaratkan adanya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Selain itu, kegiatan pembentukan dan pembagian hasil produksi nasional harus di bawah pimpinan dan pengawasan masyarakat<sup>27</sup>. Karena itu, pelaksanaan otonomi daerah sangat koheren dengan semangat ekonomi kerakyatan, yang membuat masyarakat daerah mandiri, bahkan mampu berswasembada.

Arbi Sanit pun mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat utama dalam mengimplementasikan desentralisasi dan otonomi daerah di mana pembangunan mulai tahap perencanaan hingga pengawasan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mendorong proses demokratisasi berjalan lancar dengan prinsip dasar partisipasi, kontrol, transparansi, dan akuntabilitas. Pemberdayaan masyarakat dalam deskripsi yang dimaksud merupakan upaya untuk mentransformasikan segenap potensi pertumbuhan masyarakat menjadi

---

<sup>25</sup> Johan Galtung. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization, 1996*. H.15

<sup>26</sup> Noor, I.. *Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI*. Jakarta: Seven Strategic Studies. 2012. H. 18-19

<sup>27</sup> Ibid, h. 35-36

kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan<sup>28</sup>.

Sebagai basis dari kehidupan masyarakat maka penguatan ekonomi rakyat, di samping pematangan budaya dan pemantapan agama, adalah langkah mendasar untuk memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi dan nilai itu berguna bagi kemandirian serta penguatan posisi tawar masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan negara<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Sanit, A. 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. H.32

<sup>29</sup> Ibid h 33

## **Kesimpulan**

Relasi antara otonomi daerah dengan *local wisdom* (kearifan local) memiliki keterkaitan yang sangat relevan dengan terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang. Dalam praktik dominasi kekuasaan simbolis, actor memiliki wewenang untuk mendistribusikan berbagai hal dalam kebersamaan. Jika itu terjalin maka akan sejahterah dan terjalinnya komunikasi baik antar etnik itu sendiri tidak ada istilah yang lebih mendominasi. Karena aspek kebersamaan dalam berbagai hal dilakukan dan muncullah harmonisasi etnik. Akan tetapi, apabila hal itu diabaikan dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat.

Maka dalam hal ini unsur-unsur kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memahami dinamika lokal sehingga partisipasi public daerah pun semakin besar. Hal ini karena umumnya masyarakat daerah masih memegang teguh adat dan budaya lokal. Jika pemerintah daerah mengerti kearifan lokal yang ada di wilayahnya, dengan sendirinya partisipasi masyarakat akan meningkat. Masyarakat akan merasa diperhatikan dan dimengerti oleh pemimpinnya. Disini, semangat otonomi daerah berperan ketika masyarakat daerah benar-benar berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik di daerahnya sendiri. Semakin terlibatnya publik dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, berarti terwujudnya harmonisasi etnik



## Daftar Pustaka

- Afan Gaffar.1990. “Teori Empirik Demokrasi dan Alternatif Pemikiran tentang Pelaksanaan Demokrasi Pancasila” dalam Akhmad Zaini Abar(peny) Beberapa Aspek Pembangunan Solo: Ramadhani
- Alcoff, L. and Mendieta, E., 2003, *Identities: Race, Class, Gender, and Nationality*, Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Bhabha, Homi K. 1994. *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Berger dan Luckman, 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* Jakarta: LP3ES
- Bradley, H., 1997, *Fractured Identity: Changing Patterns of Inequality*, Cambridge: Polity.
- Chandakirana, K.. Geertz.1989. *Politik dan Masalah Kesukuan*. Jakarta. Prisma No. 2/1969.
- Calhoun, C., (Ed.), 1994, *Social Theory and the Politics of Identity*, Oxford: Blackwell.
- Castells, M., 2004, *The Power of Identity*, Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Cornelis Lay. 2003. ‘Otonomi Daerah dan Keindonesiaan’ dalam A. GaffarKarim (ed) Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia.Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan Ilmu Pemerintahan, UGM
- Davis, N. Y. 2000. *Gender and Nation, serial Politics and Culture*. London: Sage Publication.
- Dwiyanto, A, dkk.. 2002. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Donald L Morowitz.1998. “Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk””.Dalam Larry Diamond dan Mars F Plattner. Nasionalisme, Konflik Etnikdan Demokrasi Bandung. ITB Pres.

Eisenberg, A., & Kymlicka, 2011. Bringing Institutions Back In: *How Public Institutions Assess Identity*. In A. Eisenberg & W. Kymlicka (Eds.), *Identity Politics in the Public Realm: Bringing Institutions Back In*. Vancouver: UBC Press.

F. Budi Hardiman, 2009. *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta: Kanisius.

Gerry Van Klinken. 2007. *Peran Kota Kecil*. Jakarta. YOI dan KITLV.

Geertz, C. 1965. *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States*. In C. Geertz, *Old Societies and New States* (pp. 105-157). New York: The Free Press.

Gutmann, A. 2003. *Identity in Democracy*. Oxfordshire: Princeton University Press.

Hall, S. and du Gay, P. (Eds), 1996, *Questions of Social Identity*, London: Sage Publications.

Henk S Nordholt. 2007. "Less State, more Democracy". Kuliah Umum yang diselenggarakan JIP dan S2 PLOD di Fisipol UGM pada tanggal 27 April.

Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta. YOI

Isin, E. E., & Wood, P. K. 1999. *Citizenship and Identity*. London: Sage Publication.

Ingram, D. Rights, 2004. *Democracy, and Fulfillment in the Era of Identity Politics: Principle Compromises in a Compromised World*. Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.

Johan Galtung, 1996. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*.

Jenkins, R., 1996, *Social Identity*, London: Routledge.

Jumadi. 2003. "Fenomena Etnis Dalam Proses Rekrutmen Elit Politik Lokal: Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang-Kalbar 2000-2005". Yogyakarta. Tesis S2 UGM.

Kemala Chandakirana. 1989. "Geertz dan Masalah Kesukuan". Jakarta. Prisma No. 2/1989.

Kenny, M., 2004, *The Politics of Identity*, Cambridge: Polity. Storry, M and Childs, P. (Eds.), 1997, *British Cultural Identities*, London: Routledg

Lijphart, Arend, and Waisman, Carlos H. (eds.). 1996. *Institutional Design in New Democracies*. Boulder: Westview.

Lucian W Pye. 1993. "Pengantar". Dalam Harold R Isaacs. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis* Jakarta YOI.

Manuel Castells, 2010. *Network Society From Knowledge to Policy*. Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations

Noor, I.. 2012. *Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI*. Jakarta: Seven Strategic Studies.

Purwanto. 2015. *Politik Identitas Dan Resolusi Konflik Transformatif*. Jurnal Review Politik Volume 6 Nomor 01 Juni Tahun 2015.

Sanit, A. 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Siti Zuhro. 1999. "Riau dan Otonomi Daerah". Dalam Syamsuddin Haris(ed.). *Indonesia di Ambang Perpecahan*, Jakarta. Erlangga. Ubed Abdilah. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang. Indonesia Tera

Syamsuddin Haris (ed.). 1999. *Indonesia di Ambang Perpecahan*. Jakarta. Erlangga.

Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang: Indonesia Tera.

Weiner, M. 1977. *Integrasi Politik dan Pembangunan Politik*. In Y. Muhaimin, & C. MacAndrews, *Masalah-masalah Pembangunan Politik* (pp. 40-49). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Wiarda, H. J. 2014. *Political Culture: Political Science, and Identity Politics: An Uneasy Alliance*. Ashgate.

Young, I. M. 1990. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press..